



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretariat
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia

Jalan Abdul Muis No. 2- 4, Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II.NERACA.....	4
III.LAPORAN OPERASIONAL	5
IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21
D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	29
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	23

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Dewan kehormatan
Penyelenggara Pemilu



Drs.Syarmadani, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19721101 199201 1 001



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Wahid Hasyim, Nomor 117, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

[medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

[@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

[DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kode satker 483005 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Dewan kehormatan
Penyelenggara Pemilu



Drs.Syarmadani, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19721101 199201 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja DKPP Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2026 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp521.801.344. Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp29.506.643.292 atau mencapai 37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp79.779.959.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp794.264.213; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.463.466.775; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp250.000.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.857.910.245 dan Rp14.649.820.743.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp220, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp31.884.480.460, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp31.884.480.460.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 17.036.216.984 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(31.371.238.189) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 28.984.841.948 sehingga ekuitas entitas mengalami penurunan senilai Rp(2.386.396.241). Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp 14.649.820.743.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 dan 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th 2026				Th 2025
	Anggaran	Realisasi	Realisasi dikurangi Anggaran	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	521.801.344		0	22.907.500
Jumlah Pendapatan Dan Hibah	0	0	0	0	0
Belanja					
Belanja Pegawai	19.495.124.000	8.049.529.975		41	5.260.214.794
Belanja Barang	58.103.311.000	19.475.344.147		34	22.980.049.758
Belanja Modal	2.181.524.000	1.981.769.170		91	658.946.690
Belanja Bantuan Sosial				0	0
Jumlah Belanja	79.779.959.000	29.506.643.292		37	28.899.211.242

II. NERACA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NERACA

PER 30 Juni 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2026	2025
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di bendahara pengeluaran	300.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	90.798.175	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – piutang Piutang Jangka Pendek	0	0
Belanja dibayar dimuka	0	0
Persediaan	403.466.038	441.491.876
JUMLAH ASET LANCAR	794.264.213	441.491.876
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	28.699.268.695	28.010.131.819
Aset Tetap Lainnya	5.597.607.638	5.597.607.638
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.833.409.558)	(17.220.923.671)
JUMLAH ASET TETAP	16.463.466.775	16.386.815.786
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka	0	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	3.174.472.555	3.174.472.555
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	438.709.749
Aset lain lain	16.500.000	234.819.113
Akumulasi penyusutan/amortisasi Aset lainnya	(2.940.972.555)	(3.034.291.668)
JUMLAH ASET LAINNYA	250.000.000	813.709.749
JUMLAH ASET	17.507.730.988	17.642.017.411
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang muka dari KPPN	300.000.000	0
Utang kepada pihak ketiga	1.195.834.783	605.800.427
Utang yang belum ditagihkan	1.362.075.462	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	605.800.427	605.800.427
JUMLAH KEWAJIBAN	605.800.427	605.800.427
EKUITAS		
Ekuitas	14.649.820.743,	17.036.216.984
JUMLAH EKUITAS	14.649.820.743,	17.036.216.984
JUMLAH KEWAJIAN DAN EKUITAS	17.507.730.988	17.642.017.411

III.LAPORAN OPERASIONAL

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025

(Dalam rupiah)

U R A I A N	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	220	
JUMLAH PENDAPATAN	220	
BEBAN		
Beban Pegawai	8.506.075.538	5.346.108.441
Beban Persediaan	495.376.617	88.224.870
Beban Barang dan Jasa	13.962.951.802	13.048.935.733
Beban Pemeliharaan	780.754.059	601.624.590
Beban Perjalanan Dinas	6.113.794.263	9.673.286.357
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.025.528.181	3.597.432.712
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
JUMLAH BEBAN	31.884.480.460,	30.737.926.523,
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(31.884.480.240,)	(30.737.926.523,)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	974.353,	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	5.564.353,	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar	4.590.000,	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	512.267.698	22.907.500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	512.267.698	22.907.500
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(31.371.238189)	(30.715.019.023)
SURPLUS (DEFISIT) LO	(31.371.238189)	(30.715.019.023)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2026	2025
EKUITAS AWAL	17.036.216.984	17.358.419.035
SURPLUS/DEFISIT-LO	(31.371.238.189)	(30.715.019.023)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	28.984.841.948	29.175.480.855
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2.386.396.241)	(1.539.538.168)
EKUITAS AKHIR	14.649.820.743	15.818.880.867

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menjaga integritas, kemendirian dan independensi sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu yang menangani pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Entitas berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim No 117.

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP dan salah satu fungsi untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang mengedepankan Integritas dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan sehingga tersusun Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan program yang berkelanjutan dalam rangka menciptakan Penyelenggaraan Pemilu berintegritas dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Lembaga dalam rangka informasi keuangan yang didapatkan
- Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan terpercaya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Transaksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi dan Keuangan Tingkat Instansi berbasis akrual yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Trwiiwulan IIITahun 2025 telah mengacu pada PMK 57 Tahun 2025. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ a tau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode sewa.

c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas hruto, yaitu dengan memhukukan penerimaan hruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumher.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui hendahara pengeluaran, pengakuan helanja terjadi pada saat pertanggungjawahan atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perhendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis helanja dan selanjutnya klasifikasi herdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Behan diakui pada saat timhulnya kewajihan; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Behan disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis helanja dan selanjutnya klasifikasi herdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam hentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sehagai herikut:
 - a. Piutang yang timhul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timhul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawah Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. • Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan aset tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Penyusutan Aset
Tetap*

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

e. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek** Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang** Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

f. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

Satuan Kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp79.779.959.000 Selama Semester I Tahun Anggaran 2026 DKPP telah melakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja DKPP sebanyak 5 kali revisi. Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja Negara dalam pelaksanaan APBN, DKPP telah melakukan langkah-langkah menindaklanjuti hal tersebut dengan pemblokiran pada belanja barang. Adapun anggaran awal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian DIPA

No	Pagu	Dasar Pengesahan	Keterangan
1)	Rp105.160.634.000	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP-DIPA Petikan) Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-010.01.1.483105/2025 tanggal 31 November 2025	DIPA Awal

berikut rincian dipa dengan nomor dipa SP DIPA- 010.01.1.483005/2026 selama Tahun Anggaran 2026 ialah adalah sebagai berikut

No	REVISI	Jumlah Rupiah	Tanggal DIPA
1)	DIPA AWAL	Rp105.160.634.000	1 Desember 2025
2)	Revisi I	83.562.212.000	24 Desember 2025
3)	Revisi II	83.562.212.000	9 Februari 2026
4)	Revisi III	83.562.212.000	9 Februari 2026
5)	Revisi IV	83.562.212.000	9 Februari 2026
6)	Revisi V	79.779.959.000	24 April 2026

Penjelasan terkait revisi sebagai berikut :

1. DIPA Revisi ke-01 Pagu Rp.83.562.212.000 Tanggal 24 Desember 2025 (Revisi kewenangan DJA dalam hal Pencadangan Anggaran Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026)
2. DIPA Revisi ke-02 Pagu Rp.83.562.212.000 Tanggal 09 Februari 2026 (Revisi kewenangan Kanwil dalam hal Pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap, perubahan rencana RPD catatan halaman IV DIPA, pemutakhiran POK)
3. DIPA Revisi ke-03 Pagu Rp.83.562.212.000 Tanggal 09 Februari 2026 (Revisi kewenangan KPA dalam hal Pemutakhiran POK)

4. DIPA Revisi ke-04 Pagu Rp.83.562.212.000 Tanggal 09 Februari 2026 (Revisi kewenangan KPA dalam hal Pemutakhiran POK)
5. DIPA Revisi ke-05 Pagu Rp.79.779.959.000 Tanggal 24 April 2026 (Revisi kewenangan DJA dalam hal Penajaman Belanja dan Pergeseran/Realokasi Anggaran Kemendagri TA 2026 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum BA BUN)
6. DIPA Revisi ke-06 Pagu Rp.79.779.959.000 Tanggal 14 Juli 2026 (Revisi Kewenangan Kanwil dalam hal Pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap, perubahan rencana RPD catatan halaman IV DIPA, pemutakhiran POK)

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp521.801.344.*

Realisasi Pendapatan yang berakhir sampai 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp521.801.344. Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan pengembalian atas belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Adapun Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Laporan Keuangan Semester I 2026 adalah sebagai berikut.

Rincian Belanja Pegawai Semester I TA 2026

(dalam Rupiah)

URAIAN	2025	
	Pendapatan	Pengembalian Pendapatan
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	5.564.353	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	220	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	348	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	516.236.423	0
Jumlah	521.801.344	0

Realisasi Pendapatan sebesar Rp521.801.344 dengan rincian:

- a. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN berdasarkan BAST Nomor 009/BAST.BMN/DKPP/I/2026 merupakan 1 paket barang inventaris kantor rusak berat berupa 1 unit motor.
- b. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasaran sesuai dengan Tusi merupakan pemotongan langsung dari SPM Gaji induk Januari dan Februari PPPK sebesar Rp220.
- c. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL merupakan pengembalian nilai Belanja pegawai melalui SPM Nomor 000104 berupa pembayaran kekurangan gaji bagi 3 Pegawai.

- d. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp516.236.423 yang merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian temuan Tahun Anggaran 2025.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja

Rp29.506.643.292

Realisasi Belanja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Laporan Keuangan Semester I 2026 adalah sebesar Rp29.506.643.292- atau mencapai 36.99% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp79.779.959.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	19.495.124.000	8.050.639.975	41.29
Belanja Barang	58.103.311.000	19.493.761.728	33.52
Belanja Modal	2.181.524.000	1.981.769.170	90.84
Total Belanja Kotor	79.779.959.000	29.526.170.873	36.99
Pengembalian Belanja	-	19.527.581	
Total Belanja Netto	79.779.959.000	29.506.643.292	36.99

- a. Pengembalian belanja sebesar Rp19.527.581,00 berupa:
- 1) Pengembalian belanja pegawai berupa Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp.1.110.000;
 - 2) Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp18.417.581;

Belanja Pegawai

Rp8.049.529.975

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp8.049.529.975 dan Rp5.260.214.794. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester I Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 53.03% persen dari Semester I Tahun 2026. Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai CPNS sebanyak 24 orang dan PPPK Tahun 2025.

Adapun rincian realiasi Belanja Pegawai di Sekretariat DKPP adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Pegawai Semester I 2026

(dalam Rupiah)

URAIAN	Pagu Anggaran	REALISASI T.A. 2026	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.168.396.000	1.847.930.800	58.32
Belanja Pembulatan Gaji PNS	952.000	24.048	2.53
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	166.208.000	87.811.320	52.83
Belanja Tunj. Anak PNS	53.914.000	19.315.438	35.83
Belanja Tunj. Struktural PNS	242.060.000	128.240.000	52.98
Belanja Tunj. PPh PNS	190.400.000	22.086.980	11.6
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	232.372.000	107.404.000	45.74
Belanja Tunj. Beras PNS	134.848.000	71.840.640	53.28
Belanja Uang Makan PNS	634.032.000	196.829.000	31.04
Belanja Tunjangan Umum PNS	51.800.000	39.035.000	75.36
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2.493.260.000	1.212.273.404	48.62
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PNS	5.292.294.000	2.486.143.097	46.98
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.626.800.000	771.990.408	47.45
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	532.000	14.559	2.74
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	132.258.000	49.672.744	37.56
Belanja Tunjangan Anak PPPK	65.072.000	13.315.137	20.46
Belanja Tunjangan Beras PPPK	132.832.000	46.288.450	34.85
Belanja Uang Makan PPPK	371.184.000	100.509.000	27.08
Belanja Tunjangan Umum PPPK	98.420.000	46.486.218	47.23
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.095.534.000	803.429.732	38.34
Belanja Uang Lembur PNS	1.392.181.000	0	0
Belanja Uang Lembur PPPK	919.775.000	0	0
Jumlah Belanja Bruto	19.495.124.000	8.050.639.975	41.29
Pengembalian Belanja Pegawai		1.110.000	
Jumlah Belanja Pegawai Netto	19.495.124.000	8.049.529.975	41.29

Terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp1.110.000 yang dilakukan pemotongan melalui SPM Kekurangan Gaji pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 sebesar Rp8.049.529.975 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS Bulan Januari s.d. Juni 2026 ;
2. Pembayaran tunjangan struktural Bulan Januari s.d Juni 2026 ;
3. Pembayaran uang beras PNS Bulan Januari s.d Juni 2026 ;
4. Pembayaran uang makan Bulan Januari s.d. Juni 2026 ;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota DKPP RI Bulan Januari s.d. Juni 2026 ;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d Juni 2026 ;
7. Pembayaran THR PNS dan PPPK Tahun 2026; dan
8. Pembayaran THR Komisioner Tahun 2026;

9. Pembayaran Gaji 13 PNS dan Tukin ke 13 100% PNS;
10. Pembayaran Gaji 13 Komisioner DKPP.
11. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari - Juni 2026

*Realisasi Belanja
Barang
Rp 19.475.344.147*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp19.475.344.147 dan Rp22.980.049.758. Terdapat pengembalian belanja barang dengan total senilai Rp18.417.581, yang merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri telah disetor Kembali ke kas negara oleh bendahara lewat Modul Penerimaan Negara (MPN) Kemenkeu. Terjadi penurunan sebesar 15 % dari belanja barang tahun 2025 dan 2026, hal itu dikarenakan terjadi penurunan pagu belanja barang pada tahun 2026 yang mengakibatkan turunnya juga realisasi TA 2026 serta menurunnya jumlah Pengaduan terkait kode etik penyelenggara pemilu yang berdampak terhadap rendahnya realisasi persidangan di daerah.

Adapun rincian realiasi Belanja Barang di Sekretariat DKPP adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	2026 (Rp)	2025	%
Belanja Barang Operasional	4.648.156.000	1.440.922.130	2.198.781.480	-34%
Belanja Barang Non Operasional	4.323.071.000	2.085.056.799	2.461.481.347	-15%
Belanja Persediaan	798.000.000	342.469.801	105.000.000	226%
Belanja Jasa	25.088.188.000	8.907.164.217	7.924.407.185	12%
Belanja Pemeliharaan	2.785.039.000	858.216.937	617.093.389	39%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.460.857.000	5.859.931.844	9.667.268.310	-39%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	10.217.715	-100%
Jumlah Belanja Kotor	58.103.311.000	19.493.761.728	22.984.249.426	-15%
Pengembalian Belanja Barang		18.417.581	4.199.668	
Total	58.103.311.000	19.475.344.147	22.984.249.426	-15%

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp1.981.769.170*

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.981.769.170 dan Rp658.946.690. Belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal per 30 Juni 2026 adalah senilai Rp1.981.769.170 atau 90,84 persen dari pagu anggaran senilai Rp2.181.524.000. Terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal di Semester I Tahun 2026 dibandingkan Semester I Tahun 2025 sebesar 201% dikarenakan pembelian aset dilakukan di Triwulan awal TA 2026. Ada pun rincian perbandingan realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2026

Uraian	Anggaran (Rp)	2026 (Rp)	2025(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan Mesin	2.181.524.000	1.981.769.170	658.946.690	201 %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	2.181.524.000	1.981.769.170	658.946.690	201 %
Pengembalian Belanja modal	0	0	0	0
Total	2.181.524.000	1.981.769.170	658.946.690	201 %

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp300.000.000*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp300.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2026 dan 2025

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2026	Tahun 2025
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	300.000.000	0
Jumlah	300.000.000	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp90.798.175*

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp90.798.175 dan Rp 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian kas lainnya merupakan LS perjalanan dinas bendahara dimuka yang belum dipertanggungjawabkan atau di catat dalam modul bendahara. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2026 dan 2025

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2026	Tahun 2025
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	90.798.175	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	90.798.175	0

Aset Lancar

Rp403.466.038

C.1.3. Persediaan

Jumlah Aset Lancar Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp403.466.038 dan Rp441.491.876 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025. Masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2026 dan 2025

Persediaan	Tahun 2026	Tahun 2025
Barang Konsumsi	386.871.432	434.852.978
Barang untuk Pemeliharaan	13.862.285	6.295.020
Suku Cadang	0	
Bahan Baku	398.000	0
Persediaan Lainnya	2.334.321	343.878
Jumlah	403.466.038	441.491.876

(dalam rupiah)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga negara yang memberikan layanan publik dan administratif/hukum, bukan memproduksi barang dagangan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian penggunaan akun dan barang pada akun bahan baku dan akan di lakukan reklas dan koreksi beban penyesuaian di Bulan Juli 2026. Dari tabel diatas, semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap

Rp 16.463.466.775

Saldo Aset Tetap Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 16.463.466.775 dan Rp 16.386.815.786. Pada saat ini Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum memiliki asset baik berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, hanya Peralatan dan Mesin dan aset tetap lainnya, dan aset tetap renovasi. Hal ini dikarenakan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baru terbentuk pada Agustus 2019 dimana kantor dan peralatan per Februari 2024 DKPP meminjam Gedung bangunan Bank Rakyat Indonesia yang saat ini berlokasi di Jalan Abdul Muis. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya berupa Peralatan dan Mesin.

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp 28.699.268.695

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp28.699.268.695 dan Rp28.010.131.819. Mutasi tambah senilai Rp1.981.769.170 merupakan realisasi belanja modal di Semester I Tahun Anggaran 2026.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Semester I Tahun 2026

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	28.010.131.819
Mutasi Tambah:	
Pembelian	1.981.769.170
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	1.292.632.294
Saldo Per 30 Juni 2026	28.699.268.695
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(17.833.409.558)
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	10.865.859.137

Terdapat penghentian aset ditahun 2025 yang merupakan aset tetap pemerintah yang tidak digunakan senilai Rp236.074.113. Selanjutnya di Tahun 2026 hingga dilakukan penghentian guna aset tetap peralatan mesin senilai Rp 1.292.632.294 sebanyak 328 jumlah unit barang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.3.4-742 Tahun 2026 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun surat Keputusan terlampir.

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp5.597.607.638

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pada DKPP terdapat aset tetap lainnya senilai Rp5.597.607.638 yang digunakan untuk merenovasi Gedung DKPP RI yang merupakan gedung milik BUMN BRI sehingga diklasifikasikan menjadi aset tetap renovasi karena

membiayai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Adapun rincian Aset Tetap Renovasi pada DKPP adalah sebagai berikut:

No	NAMA	Nilai Perolehan Pertama	Nilai Mutasi	Nilai Perolehan
1	Kantor DKPP lantai 1-2	3.185.000.000	1.441.528.970	4.626.528.970
2	Kantor DKPP Lantai 3-4	762.000.000	0	762.000.000
3	INVERTER DRIVE ASSY (LIFT) INVERTER DRIVE ASSY (LIFT)	209.078.668	0	209.078.668
Total Perolehan				5.597.607.638

Nilai mutasi sebesar Rp1.441.528.970 merupakan nilai Aset Tetap Renovasi berupa renovasi Kantor DKPP yang saat ini ditempati. Adapun realisasi anggarannya di lakukan di Tahun Anggaran 2024.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp17.833.409.558*

C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp(17.833.409.558) dan Rp 17.220.923.671,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I TA 2026

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	28.699.268.695	17.833.409.558	10.865.859.137
2	Aset Tetap Lainnya	5.597.607.638	0	5.597.607.638
Akumulasi Penyusutan			17.833.409.558	16.463.466.775

*Aset Lainnya Rp
250.000.000*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp250.000.000 dan Rp813.709.749. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Sekretariat

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terdiri dari Aset tak berwujud dan aset lainnya.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

*AsetTak Berwujud Rp
3,174,472,555*

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Terdapat aset lainnya berupa software sebagai berikut:

1. Aplikasi Monitoring dashboard dengan Nomor BAST yang di gunakan untuk mendukung tugas dan fungsi DKPP RI dalam menangani pengaduan yang masuk ke DKPP RI
2. BMN pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang dialihstatuskan Kepada DKPP RI dengan jenis software computer berupa aplikasi SIETIK dengan nomor BAST-2.A/DKPP/SET-06/IV/2025 17 April 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengaduan secara elektronik dan digitalisasi data perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
3. Penggunaan BMN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Kementerian Dalam Negeri dengan BAST Nomor 16539.1/PL.09/SJ/12/2025 dan Nomor 000.3.3.2/9680/SJ Tanggal 5 Bulan Desember Tahun 2025 berupa software computer Website DKPP RI.

C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang Dibatasi
penggunaannya Rp0*

Dana yang dibatasi penggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya. Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana yang belum/tidak menjadi hak negara. Adapun dana yang dibatasi penggunaannya di DKPP ialah Rp.0.

*Aset Lain-Lain
Rp16.500.000*

C.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp16.500.000 dan Rp234.819.113. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2026	234.819.113
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	5.685.641
Saldo Per 30 Juni 2026	16.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	233.169.113
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	1.650.000

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp2.940.972.555*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2.940.972.555 dan Rp3.034.291.668.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya *Semester I 2026*

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	Aset Tak Berwujud	3.174.472.555		
	Jumlah	3.174.472.555		
B.	Aset Lain-lain	16.500.000		
C.	Dana dibatasi penggunaannya	0		
		3.190.972.555	2.940.972.555	
	Jumlah			
Total		250.000.000		

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Uang Muka dari
KPPN
Rp300.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp300.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak
ketiga
Rp1.195.834.783

C.5.2. Utang kepada pihak ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1.195.834.783,- dan Rp605.800.427,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun Utang kepada pihak ketiga ialah berupa belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Bulan Desember Tahun 2025, Selain itu belanja barang berupa belanja tagihan Listrik dan internet bulan 12 Tahun 2026 4196.

Rincian Utang Kepada pihak ketiga per 30 Juni 2026

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Juni 2025
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	571.164.608	291.258.561
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	533.872.000	56.461.439
3	Utang Kepada pihak ketiga lainnya	90.798.783	258.080.276
	Jumlah	1.195.834.783	605.800.427

Adapun rincian utang pihak ketiga per 30 Juni Tahun 2026 sebagai berikut

No	Uraian	30 Juni 2026
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	571.164.608
	Belanja Gaji Induk PNS Bulan Juli 2026	267.674.950
	Belanja Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2026	125.399.658
	Belanja Uang Kehormatan Bulan Juli 2026	178.090.000
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	533.872.000
	Belanja Perjalanan Dinas	
	Belanja Jasa Lainnya Pembayaran Gaji TA	165.000.000
	Belanja Jasa Lainnya Pembayaran Gaji Paruh waktu	89.652.000
	Belanja Honor Keuangan Juni 2026	8.470.000
	Belanja Perjalanan Dinas	270.750.000
3	Utang Kepada pihak ketiga lainnya	90.798.783

	kas pada bendahara pengeluaran berupa LS	90.798.783
	Jumlah	1.195.834.783

*Utang yang belum
ditagihkan
Rp1.362.075.462*

C.5.3. Utang Yang Belum ditagihkan

Utang yang belum diterima tagihannya merujuk pada utang yang telah dicatat dalam pembukuan, tetapi tagihan atas utang tersebut belum diterima oleh pihak yang berutang. Dalam konteks akuntansi, utang ini biasanya muncul ketika ada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum ditindaklanjuti dengan proses pembayaran, atau ketika ada kesalahan perekaman BAST yang menyebabkan saldo utang menggantung. Adapun Utang yang belum ditagihkan di DKPP sebesar Rp1.362.075.462 .

Adapun rincian Utang yang Belum di tagihkan Adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2026
1	PB yang belum di buat SPM	214.514.461
2	Kontrak Video Tron	99.300.001
3	Kontrak Kegiatan Diseminasi Wilayah 3	1.048.261.000
	Jumlah	1.362.075.462

Utang yang belum ditagihkan merupakan tagihan perintah bayar dan bast kontrak yang sudah di lakukan pencatatatan BAST namun belum di ajukan SPM hingga periode berakhir.

Ekuitas

Rp14.649.820.743

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp14.649.820.743 dan Rp17.036.216.984. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp8.506.075.538

Jumlah Beban Pegawai pada *Semester I* Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp8.506.075.538,- dan Rp-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dan Beban Pegawai Semester I TA 2026

URAIAN	BEBAN (LO)	BELANJA (LRA)	Selisih
Belanja Gaji Pokok PNS	2.058.385.700	1.847.930.800	210.454.900
Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.072,	24.048	3.024
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98.794.368,	87.811.320	10.983.048
Belanja Tunj. Anak PNS	21.827.753,	19.315.438	2.512.315
Belanja Tunj. Struktural PNS	144.270.000,	128.240.000	16.030.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	120.762.000,	107.404.000	13.358.000
Belanja Tunj. PPh PNS	22.558.143,	22.086.980	471.163
Belanja Tunj. Beras PNS	80.893.140,	71.840.640	9.052.500
Belanja Uang Makan PNS	172.976.000,	196.829.000	-23.853.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	43.845.000,	39.035.000	4.810.000
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.390.363.404	1.212.273.404	178.090.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PNS	2407277052	2.486.143.097	-78.866.045
Beban Gaji Pokok PPPK	876.068.108	771.990.408	104.077.700
Beban Pembulatan Gaji PPPK	16.533,	14.559	1.974
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	56.625.764,	49.672.744	6.953.020
Beban Tunjangan Anak PPPK	15.126.561,	13.315.137	1.811.424
Beban Tunjangan Beras PPPK	52.588.990,	46.288.450	6.300.540
Beban Uang Makan PPPK	88.609.000,	100.509.000	-11.900.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	52.741.218,	46.486.218	6.255.000
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	803429732,	803.429.732	0
Pengembalian Belanja	-1.110.000,	1.110.000	0
TOTAL	8.506.075.538	8.049.529.975	456.545.563

Terdapat selisih pada akun belanja Pegawai dan Beban pegawai sebesar Rp456.545.563 merupakan selisih beban gaji induk PNS dan PPPK Bulan Juli Tahun 2026, serta Tukin dan Uang Makan PNS PPPK Desember 2025 yang dibayarkan di Januari 2026 menggunakan Dipa TA 2026.

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp495.376.617

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp725.499.516 dan Rp2.565.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	2026	2025	%
Beban Persediaan konsumsi	494.291.820	725,499,516	
Beban Persediaan bahan baku	297.000		
Beban persediaan lainnya	787.797	468,057	
Jumlah Beban	495,376,617	725,967,573	

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Persediaan Konsumsi dengan jumlah beban persediaan per 30 Juni 2026 .

D.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp27.771.306.050

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Semester I Tahun Anggaran 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp27.771.306.050,- dan Rp12.980.594.460,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Untuk 30 Juni Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2026 dan 2025*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Beban (LO)	Realisasi (LRA)	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	1.050.221.418,	899.576.767	(150.644.651)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25.008.570,	24.433.570	(575.000)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50.820.000,	42.350.000	(8.470.000)
Beban Barang Operasional Lainnya	478.518.503,	474.561.793	(3.956.710)
Beban Bahan	768.298.948,	684.406.948	(83.892.000)
Beban Honor Output Kegiatan	19.670.000,	19.670.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.382.479.851,	1.380.979.851	(1.500.000)
Beban Langganan Listrik	337.424.441,	337.424.441	0
Beban Langganan Air	74.404.348,	74.404.348,	0
Beban Jasa Konsultan	26.973.000,	26.973.000,	0
Beban Sewa	2.777.090.995,	2.654.940.994	(122.150.001)
Beban Jasa Profesi	310.700.000,	308.900.000,	(1.800.000)
Beban Jasa Lainnya	6.661.341.728,	5.504.521.434	(1.156.820.294)
TOTAL	13.962.951.802,	12.433.143.146	(1.529.808.656)

Terdapat perbedaan pencatatan Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2026 dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA dengan selisih Rp1.529.808.656 diakibatkan sudah dilakukan pencatatan BAST atau SPBY namun belum diajukan SPM ke KPPN.

D.4 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp1.746.842.566*

Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp601.624.590 dan Rp482.799.227. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2026 dan 2025*

(dalam Rupiah)

Uraian	BEBAN	LRA	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334.372.932,		0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	360.796.252,		
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11.969.675,		

Beban Persediaan suku cadang	73.615.200,		0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334.372.932,		
Jumlah Beban	780.754.059,		

Atas beban pemeliharaan diatas, tidak terdapat pencatatan belanja persediaan pada LRA. Hal ini disebabkan oleh pemakaian persediaan tersebut tidak mengakibatkan adanya arus kas masuk/keluar, sehingga tidak ada pencatatan pada LRA.

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp6.113.794.263

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.113.794.263 dan Rp5.859.931.844. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya penambahan uang tambahan anggaram dari kementerian keuangan untuk perjalanan dinas persidangan didukung dengan frekuensi aduan yang meningkat sehingga dibutuhkan persidangan di daerah dengan belanja perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja perjalanan dinas dan Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2026

URAIAN JENIS BEBAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.326.186.263	5.055.436.263	(270.750.000)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	167.640.000	166.110.000	(1.530.000)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	590.428.000	590.428.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29.540.000	29.540.000	0
TOTAL	6.113.794.263	5.841.514.263	(272.280.000)

Terdapat selisih antara LRA dan LO pada belanja perjalanan dinas senilai Rp272.280.000 merupakan selisih beban dengan belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang dilakukan pada akhir Semester I 2026 dicatat sebagai beban, namun kasnya belum dikeluarkan atau belum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.025.528.181

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2.025.528.181 dan Rp1.979.746.532. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	2026	2025	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.900.528.181,	3.253.648.773	
Beban Amortisasi Software	125.000.000	549.177.113	
Jumlah Amortisasi			
Jumlah Beban	2.025.528.181	1,979.746.532	

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp512.267.698

D.8 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2026

URAIAN JENIS BEBAN	2026	2025
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	512.267.698	60.385.640
Jumlah	512.267.698	60.385.640

Terdapat pendapatan dari kegiatan non operasional yang terdiri dari:

1. Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp512.267.698 yang berasal dari implikasi temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK tahun anggaran 2025 berupa kelebihan belanja barang yang harus disetor ke kas negara.

Terdapat perbedaan pendapatan di LRA dan Pendapatan LO, adapun dapat dilihat dari tabel berikut

URAIAN JENIS BEBAN	2026	2025
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	516.236.423	512.267.698
Jumlah	512.267.698	60.385.640

D.9 Pos Luar Biasa

Pas Luar Biasa Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2026 dan 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp17.036.216.984

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp17.036.216.984 dan Rp17.358.419.035.

Defisit LO Rp31.271.238.189

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah defisit sebesar Rp31.371.238.189 dan Rp30.715.019.023. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Transaksi Antar Entitas Rp28.984.841.948

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.984.841.948 dan Rp29.175.480.855. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Semester I Tahun 2026

Transaksi Antar Entitas	30 Juni 2026	2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	29.506.643.292,	28899211242
Diterima dari Entitas Lain	-521.801.344,	-22907500
Transfer Masuk	0,	0
Jumlah	28.984.841.948,	29.175.480.855

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN) dan merupakan jumlah semua realisasi Semester I Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar Rp28.984.841.848
2. Diterima dari entitas lain senilai Rp521.801.344
Diterima dari entitas lain jumlah seluruh pengembalian belanja barang tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2025 dan pengembalian belanja barang Tahun Anggaran 2025.

Rincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain Semester I Tahun 2026

Diterima dari Entitas Lain	REALISASI T.A.2026
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	5.564.353
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	348
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	516.236.771
Jumlah	521.801.344

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp14.649.820.743

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp14.649.820.743 dan Rp15.818.880.867

Pengungkapan Lain-lain

F. Pengungkapan Lain-lain

- Terdapat mutasi tambah Aset Tak Berwujud Sebesar Rp1.877.912.555 berupa Software Komputer yang merupakan Aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (SIETIK), Website DKPP yang dialihkan status Kepada DKPP RI berdasarkan BAST Nomor 2A/DKPP/SET-06/IV/2025.
- Terdapat 2 Program prioritas Nasional yang termasuk kedalam kode Prioritas Nasional Ke-7 “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Adapun uraian PN DKPP Adalah Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TERKAIT PENGHAPUSAN LELANG DAN BAST LELANG BMN**
- 2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA**
- 3. BERITA ACARA REKON INTERNAL**
- 4. FORMULIR MEMO PENYESUAIAN**
- 5. SURAT HASIL REKONSILIASI**
- 6. CETAKAN MYINTRESS**
 - NERACA PERCOBAAN AKRUAL**
 - NERACA PERCOBAAN KAS**
 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
 - LAPORAN OPERASIONAL**
 - LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
 - NERACA**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.3.4-742 TAHUN 2026
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Satuan Kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Nomor 000.3.3.2/9664/SJ tanggal 4 Desember 2025 Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
 2. Salinan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor 8/07.04/2026-01 tanggal 27 Januari 2026;
 3. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Nomor 009/BAST.BMN/DKPP/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 antara Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dengan Pemenang Lelang;
 4. Surat Sekretaris DKPP Nomor 81/DKPP/SET-01/I/2026 tanggal 29 Januari 2026 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menghapus Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.3.4-742 TAHUN 2026
TENTANG
PENCAPAIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN
PADA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2012	1	1	2.255.000	Rusak Berat
2	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2012	2	1	4.348.396	Rusak Berat
3	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2012	3	1	2.805.000	Rusak Berat
4	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2012	4	1	2.805.000	Rusak Berat
5	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	1	1	14.300.000	Rusak Berat
6	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	2	1	4.950.000	Rusak Berat
7	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	3	1	4.950.000	Rusak Berat
8	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	4	1	14.300.000	Rusak Berat
9	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	5	1	14.300.000	Rusak Berat
10	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	6	1	14.300.000	Rusak Berat
11	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	7	1	14.300.000	Rusak Berat
12	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014	8	1	18.150.000	Rusak Berat
13	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2012	1	1	3.490.000	Rusak Berat
14	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2012	2	1	3.490.000	Rusak Berat
15	3.05.01.05.010	White Board	2021	4	1	1.500.000	Rusak Berat
16	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	2013	2	1	2.850.000	Rusak Berat
17	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2016	1	1	17.473.036	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2016	2	1	6.623.261	Rusak Berat
19	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2016	3	1	5.993.426	Rusak Berat
20	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	1	1	4.400.000	Rusak Berat
21	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	2	1	4.400.000	Rusak Berat
22	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	3	1	4.400.000	Rusak Berat
23	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	4	1	4.400.000	Rusak Berat
24	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	5	1	4.400.000	Rusak Berat
25	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2014	6	1	2.750.000	Rusak Berat
26	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	7	1	1.799.160	Rusak Berat
27	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	8	1	1.799.160	Rusak Berat
28	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	9	1	1.799.160	Rusak Berat
29	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	10	1	1.799.160	Rusak Berat
30	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	11	1	1.799.160	Rusak Berat
31	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	12	1	1.799.160	Rusak Berat
32	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	13	1	5.500.000	Rusak Berat
33	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	14	1	7.470.000	Rusak Berat
34	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	15	1	7.470.000	Rusak Berat
35	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	16	1	7.470.000	Rusak Berat
36	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	17	1	7.470.000	Rusak Berat
37	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	18	1	4.500.000	Rusak Berat
38	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	19	1	1.799.160	Rusak Berat
39	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	20	1	7.400.000	Rusak Berat
40	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	21	1	1.243.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	22	1	1.799.160	Rusak Berat
42	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	23	1	1.799.160	Rusak Berat
43	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	24	1	1.799.160	Rusak Berat
44	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	25	1	2.162.820	Rusak Berat
45	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	26	1	2.162.820	Rusak Berat
46	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	27	1	2.162.820	Rusak Berat
47	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	28	1	5.900.000	Rusak Berat
48	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	29	1	5.900.000	Rusak Berat
49	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	30	1	7.400.000	Rusak Berat
50	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	31	1	5.900.000	Rusak Berat
51	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	32	1	5.900.000	Rusak Berat
52	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	33	1	2.162.820	Rusak Berat
53	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	34	1	3.000.000	Rusak Berat
54	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	35	1	3.000.000	Rusak Berat
55	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	36	1	3.000.000	Rusak Berat
56	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	37	1	3.000.000	Rusak Berat
57	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	38	1	3.000.000	Rusak Berat
58	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	39	1	3.000.000	Rusak Berat
59	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	40	1	6.000.000	Rusak Berat
60	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2015	41	1	3.425.000	Rusak Berat
61	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2015	42	1	3.425.000	Rusak Berat
62	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	43	1	1.799.160	Rusak Berat
63	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	44	1	1.799.160	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	45	1	1.799.160	Rusak Berat
65	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	46	1	1.799.160	Rusak Berat
66	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	47	1	1.799.160	Rusak Berat
67	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	48	1	1.799.160	Rusak Berat
68	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	49	1	1.799.160	Rusak Berat
69	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	50	1	1.799.160	Rusak Berat
70	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	51	1	1.799.160	Rusak Berat
71	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	52	1	1.799.160	Rusak Berat
72	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	53	1	1.799.160	Rusak Berat
73	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	54	1	1.799.160	Rusak Berat
74	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	55	1	1.799.160	Rusak Berat
75	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	56	1	1.799.160	Rusak Berat
76	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	57	1	1.799.160	Rusak Berat
77	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	58	1	1.799.160	Rusak Berat
78	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	59	1	1.799.160	Rusak Berat
79	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	60	1	1.799.160	Rusak Berat
80	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	61	1	1.799.160	Rusak Berat
81	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	62	1	1.799.160	Rusak Berat
82	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	63	1	1.799.160	Rusak Berat
83	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	64	1	1.799.160	Rusak Berat
84	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	65	1	1.799.160	Rusak Berat
85	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	66	1	1.799.160	Rusak Berat
86	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	67	1	1.799.160	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
87	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	68	1	1.799.160	Rusak Berat
88	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	69	1	1.799.160	Rusak Berat
89	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	70	1	1.799.160	Rusak Berat
90	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	71	1	1.799.160	Rusak Berat
91	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	72	1	1.799.160	Rusak Berat
92	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	73	1	1.799.160	Rusak Berat
93	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	74	1	1.799.160	Rusak Berat
94	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	75	1	1.799.160	Rusak Berat
95	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	76	1	1.799.160	Rusak Berat
96	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	77	1	1.799.160	Rusak Berat
97	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	78	1	1.799.160	Rusak Berat
98	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	79	1	1.799.160	Rusak Berat
99	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	80	1	1.799.160	Rusak Berat
100	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	81	1	1.799.160	Rusak Berat
101	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	82	1	1.799.160	Rusak Berat
102	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	83	1	2.162.820	Rusak Berat
103	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	84	1	2.162.820	Rusak Berat
104	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	85	1	2.162.820	Rusak Berat
105	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	86	1	2.162.820	Rusak Berat
106	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	87	1	1.799.160	Rusak Berat
107	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	88	1	2.162.820	Rusak Berat
108	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	89	1	1.799.160	Rusak Berat
109	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	90	1	1.799.160	Rusak Berat

No (1)	Kode Barang (2)	Nama Barang (3)	Tahun Perolehan (4)	NUP (5)	Jumlah (6)	Nilai Perolehan (Rp) (7)	Keterangan (8)
110	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	91	1	4.400.000	Rusak Berat
111	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	92	1	4.400.000	Rusak Berat
112	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	93	1	4.400.000	Rusak Berat
113	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	94	1	4.400.000	Rusak Berat
114	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	95	1	4.400.000	Rusak Berat
115	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	96	1	4.400.000	Rusak Berat
116	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	97	1	3.425.000	Rusak Berat
117	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	98	1	3.425.000	Rusak Berat
118	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	99	1	3.425.000	Rusak Berat
119	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	100	1	3.425.000	Rusak Berat
120	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	101	1	3.425.000	Rusak Berat
121	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	102	1	7.400.000	Rusak Berat
122	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	103	1	7.400.000	Rusak Berat
123	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	104	1	4.230.000	Rusak Berat
124	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	1	1	357.500	Rusak Berat
125	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	2	1	357.500	Rusak Berat
126	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	3	1	357.500	Rusak Berat
127	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	4	1	357.500	Rusak Berat
128	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	5	1	357.500	Rusak Berat
129	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	6	1	357.500	Rusak Berat
130	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	7	1	357.500	Rusak Berat
131	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	8	1	357.500	Rusak Berat
132	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	9	1	1.100.000	Rusak Berat

No (1)	Kode Barang (2)	Nama Barang (3)	Tahun Perolehan (4)	NUP (5)	Jumlah (6)	Nilai Perolehan (Rp) (7)	Keterangan (8)
133	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	10	1	1.100.000	Rusak Berat
134	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	11	1	1.100.000	Rusak Berat
135	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	12	1	1.100.000	Rusak Berat
136	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	13	1	1.100.000	Rusak Berat
137	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	14	1	1.100.000	Rusak Berat
138	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	15	1	1.100.000	Rusak Berat
139	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	16	1	1.100.000	Rusak Berat
140	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	17	1	1.100.000	Rusak Berat
141	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	18	1	1.100.000	Rusak Berat
142	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	19	1	9.570.000	Rusak Berat
143	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	20	1	9.570.000	Rusak Berat
144	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	21	1	9.570.000	Rusak Berat
145	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	22	1	9.570.000	Rusak Berat
146	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	23	1	9.570.000	Rusak Berat
147	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2019	24	1	9.570.000	Rusak Berat
148	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	25	1	357.500	Rusak Berat
149	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	26	1	357.500	Rusak Berat
150	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	27	1	357.500	Rusak Berat
151	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	28	1	357.500	Rusak Berat
152	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	29	1	357.500	Rusak Berat
153	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2005	30	1	357.500	Rusak Berat
154	3.05.02.01.008	Meja Rapat	2014	3	1	7.200.000	Rusak Berat
155	3.05.02.01.008	Meja Rapat	2012	4	1	24.950.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
156	3.05.02.01.008	Meja Rapat	2012	5	1	24.950.000	Rusak Berat
157	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	1	1	840.000	Rusak Berat
158	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	2	1	840.000	Rusak Berat
159	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	3	1	840.000	Rusak Berat
160	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	4	1	840.000	Rusak Berat
161	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	5	1	840.000	Rusak Berat
162	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	6	1	840.000	Rusak Berat
163	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	10	1	840.000	Rusak Berat
164	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	11	1	980.000	Rusak Berat
165	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	12	1	980.000	Rusak Berat
166	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	13	1	980.000	Rusak Berat
167	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	14	1	840.000	Rusak Berat
168	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	15	1	840.000	Rusak Berat
169	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	16	1	840.000	Rusak Berat
170	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	17	1	840.000	Rusak Berat
171	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	18	1	840.000	Rusak Berat
172	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	19	1	840.000	Rusak Berat
173	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	20	1	705.000	Rusak Berat
174	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	21	1	705.000	Rusak Berat
175	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	22	1	705.000	Rusak Berat
176	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	23	1	705.000	Rusak Berat
177	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	24	1	705.000	Rusak Berat
178	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	25	1	705.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
179	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	26	1	705.000	Rusak Berat
180	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	27	1	705.000	Rusak Berat
181	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	28	1	705.000	Rusak Berat
182	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	29	1	1.291.950	Rusak Berat
183	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	30	1	1.291.950	Rusak Berat
184	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	31	1	1.291.950	Rusak Berat
185	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	32	1	1.291.950	Rusak Berat
186	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	33	1	1.291.950	Rusak Berat
187	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	34	1	1.291.950	Rusak Berat
188	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	35	1	1.291.950	Rusak Berat
189	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	36	1	1.310.400	Rusak Berat
190	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	37	1	1.310.400	Rusak Berat
191	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	38	1	1.310.400	Rusak Berat
192	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	39	1	1.310.400	Rusak Berat
193	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	40	1	4.056.000	Rusak Berat
194	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	41	1	4.056.000	Rusak Berat
195	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	42	1	4.056.000	Rusak Berat
196	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	43	1	4.056.000	Rusak Berat
197	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	44	1	2.180.750	Rusak Berat
198	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	45	1	2.180.750	Rusak Berat
199	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	46	1	2.180.750	Rusak Berat
200	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	47	1	2.180.750	Rusak Berat
201	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	48	1	2.180.750	Rusak Berat

No (1)	Kode Barang (2)	Nama Barang (3)	Tahun Perolehan (4)	NUP (5)	Jumlah (6)	Nilai Perolehan (Rp) (7)	Keterangan (8)
202	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	49	1	2.180.750	Rusak Berat
203	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	50	1	980.000	Rusak Berat
204	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	51	1	980.000	Rusak Berat
205	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	52	1	980.000	Rusak Berat
206	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	53	1	980.000	Rusak Berat
207	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	54	1	980.000	Rusak Berat
208	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	55	1	980.000	Rusak Berat
209	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	56	1	980.000	Rusak Berat
210	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	57	1	980.000	Rusak Berat
211	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	58	1	980.000	Rusak Berat
212	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	59	1	980.000	Rusak Berat
213	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	67	1	1.291.950	Rusak Berat
214	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2013	73	1	4.450.000	Rusak Berat
215	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2013	74	1	4.450.000	Rusak Berat
216	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	75	1	1.291.950	Rusak Berat
217	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	77	1	2.960.000	Rusak Berat
218	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	78	1	705.000	Rusak Berat
219	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	79	1	705.000	Rusak Berat
220	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	80	1	705.000	Rusak Berat
221	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	81	1	705.000	Rusak Berat
222	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	82	1	705.000	Rusak Berat
223	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	83	1	705.000	Rusak Berat
224	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	84	1	705.000	Rusak Berat

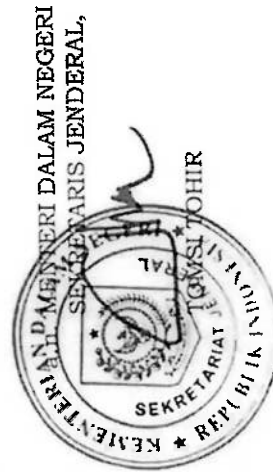
No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
225	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	85	1	705.000	Rusak Berat
226	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	86	1	705.000	Rusak Berat
227	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	87	1	705.000	Rusak Berat
228	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2013	88	1	4.450.000	Rusak Berat
229	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2013	89	1	4.450.000	Rusak Berat
230	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2013	90	1	3.500.000	Rusak Berat
231	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	105	1	705.000	Rusak Berat
232	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	106	1	705.000	Rusak Berat
233	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	107	1	1.150.000	Rusak Berat
234	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	108	1	1.150.000	Rusak Berat
235	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	109	1	1.150.000	Rusak Berat
236	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	110	1	1.150.000	Rusak Berat
237	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	111	1	1.150.000	Rusak Berat
238	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	112	1	2.960.000	Rusak Berat
239	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	113	1	2.960.000	Rusak Berat
240	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2018	114	1	1.291.950	Rusak Berat
241	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	115	1	705.000	Rusak Berat
242	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	116	1	705.000	Rusak Berat
243	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	117	1	2.960.000	Rusak Berat
244	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	118	1	2.960.000	Rusak Berat
245	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	123	1	1.150.000	Rusak Berat
246	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	124	1	1.150.000	Rusak Berat
247	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2016	125	1	1.150.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
248	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	126	1	1.150.000	Rusak Berat
249	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	127	1	1.150.000	Rusak Berat
250	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	128	1	1.150.000	Rusak Berat
251	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	129	1	1.150.000	Rusak Berat
252	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	130	1	1.150.000	Rusak Berat
253	3.05.02.01.028	Workstation	2014	1	1	65.150.000	Rusak Berat
254	3.05.02.01.028	Workstation	2014	2	1	74.250.000	Rusak Berat
255	3.05.02.02.004	Control Clock	2014	1	1	5.225.000	Rusak Berat
256	3.05.02.02.004	Control Clock	2014	2	1	5.225.000	Rusak Berat
257	3.05.02.02.004	Control Clock	2014	3	1	5.225.000	Rusak Berat
258	3.05.02.04.001	Lemari Es	2012	1	1	2.812.500	Rusak Berat
259	3.05.02.04.004	A.C. Split	2015	11	1	10.600.000	Rusak Berat
260	3.05.02.04.004	A.C. Split	2015	12	1	10.600.000	Rusak Berat
261	3.05.02.04.004	A.C. Split	2015	16	1	10.600.000	Rusak Berat
262	3.05.02.04.004	A.C. Split	2015	17	1	10.600.000	Rusak Berat
263	3.05.02.04.004	A.C. Split	2014	20	1	7.150.000	Rusak Berat
264	3.05.02.04.004	A.C. Split	2014	21	1	7.150.000	Rusak Berat
265	3.05.02.04.004	A.C. Split	2014	22	1	7.150.000	Rusak Berat
266	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	23	1	9.460.000	Rusak Berat
267	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	24	1	9.460.000	Rusak Berat
268	3.05.02.04.004	A.C. Split	2015	38	1	10.600.000	Rusak Berat
269	3.05.02.06.002	Televisi	2014	3	1	7.350.000	Rusak Berat
270	3.05.02.06.014	Microphone	2016	8	1	7.150.132	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
271	3.05.02.06.014	Microphone	2016	9	1	7.150.132	Rusak Berat
272	3.05.02.06.014	Microphone	2016	10	1	7.150.132	Rusak Berat
273	3.05.02.06.014	Microphone	2016	11	1	7.150.132	Rusak Berat
274	3.05.02.06.014	Microphone	2016	12	1	7.150.132	Rusak Berat
275	3.05.02.06.016	Mic Conference	2020	2	1	4.950.000	Rusak Berat
276	3.05.02.06.016	Mic Conference	2020	3	1	4.950.000	Rusak Berat
277	3.05.02.06.036	Dispenser	2012	1	1	1.500.000	Rusak Berat
278	3.05.02.06.071	Kabel	2020	1	1	935.000	Rusak Berat
279	3.05.02.06.071	Kabel	2020	2	1	605.000	Rusak Berat
280	3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	2014	3	1	7.458.000	Rusak Berat
281	3.06.01.01.088	Voice Recorder	2016	1	1	710.000	Rusak Berat
282	3.07.01.20.010	Kursi Gynecologi	2014	1	1	99.000.000	Rusak Berat
283	3.10.01.02.001	P.C Unit	2014	38	1	8.100.000	Rusak Berat
284	3.10.01.02.001	P.C Unit	2014	39	1	8.100.000	Rusak Berat
285	3.10.01.02.001	P.C Unit	2015	40	1	12.870.370	Rusak Berat
286	3.10.01.02.001	P.C Unit	2015	41	1	12.870.370	Rusak Berat
287	3.10.01.02.001	P.C Unit	2014	47	1	8.100.000	Rusak Berat
288	3.10.01.02.001	P.C Unit	2013	49	1	10.550.000	Rusak Berat
289	3.10.01.02.001	P.C Unit	2016	52	1	12.059.333	Rusak Berat
290	3.10.01.02.001	P.C Unit	2016	53	1	12.059.333	Rusak Berat
291	3.10.01.02.001	P.C Unit	2016	54	1	12.059.333	Rusak Berat
292	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	60	1	11.187.000	Rusak Berat
293	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	61	1	11.187.000	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
294	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	62	1	11.187.000	Rusak Berat
295	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	63	1	11.187.000	Rusak Berat
296	3.10.01.02.001	P.C Unit	2014	64	1	11.309.530	Rusak Berat
297	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	66	1	18.475.000	Rusak Berat
298	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	67	1	18.475.000	Rusak Berat
299	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	68	1	18.475.000	Rusak Berat
300	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	84	1	18.475.000	Rusak Berat
301	3.10.01.02.001	P.C Unit	2012	85	1	12.500.000	Rusak Berat
302	3.10.01.02.001	P.C Unit	2015	95	1	10.369.777	Rusak Berat
303	3.10.01.02.001	P.C Unit	2016	101	1	8.190.000	Rusak Berat
304	3.10.01.02.001	P.C Unit	2016	102	1	8.190.000	Rusak Berat
305	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1	1	4.807.990	Rusak Berat
306	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	2	1	4.807.990	Rusak Berat
307	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	6	1	4.807.990	Rusak Berat
308	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	8	1	4.807.990	Rusak Berat
309	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	9	1	4.807.990	Rusak Berat
310	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	34	1	4.300.000	Rusak Berat
311	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	41	1	4.280.126	Rusak Berat
312	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	45	1	4.675.000	Rusak Berat
313	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	47	1	1.815.000	Rusak Berat
314	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	51	1	4.300.000	Rusak Berat
315	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	52	1	4.300.000	Rusak Berat
316	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	54	1	5.395.500	Rusak Berat

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
317	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	55	1	5.395.500	Rusak Berat
318	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	57	1	4.675.000	Rusak Berat
319	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	58	1	4.675.000	Rusak Berat
320	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	59	1	4.675.000	Rusak Berat
321	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	63	1	3.442.846	Rusak Berat
322	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	65	1	5.904.250	Rusak Berat
323	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2020	1	1	4.866.950	Rusak Berat
324	3.10.02.04.001	Server	2020	25	1	4.180.000	Rusak Berat
325	3.10.02.04.001	Server	2020	26	1	4.180.000	Rusak Berat
326	3.10.02.04.001	Server	2020	30	1	3.822.500	Rusak Berat
327	3.10.02.04.014	Rak Server	2020	1	1	9.240.000	Rusak Berat
328	3.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2020	1	1	5.500.000	Rusak Berat
JUMLAH						1.528.706.407	





DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

dkpp_ri

medsosdkpp

@DKPP_RI

DKPP RI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nomor : 009/BAST.BMN/DKPP/II/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : Mhd. Idris Evrisal Lubis, S.IP, M.E.
NIP : 19940924 201609 1 007
Jabatan : Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Kedudukan : Jalan Abdul Muis No.2-4, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama*.
2. Nama : Moh Taufik
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Kedudukan : Dsn Pammasan. 001/002 , selanjutnya disebut sebagai *Pihak Kedua*.

Telah melakukan serah terima barang berupa Peralatan dan Mesin pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima 1 (satu) paket Inventaris Kantor dalam kondisi rusak berat pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah melalui proses Lelang di sistem Lelang DJKN pada tanggal 27 Januari 2026.

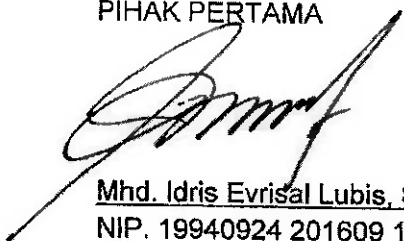
Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan membayar barang tersebut dengan harga Rp. 5.564.353,- (Lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan biaya lelang sebesar 2 % dari harga jual sebesar Rp. 111.288,- (Seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan Kode Lot Lelang : 8COLOR.

Pasal 3

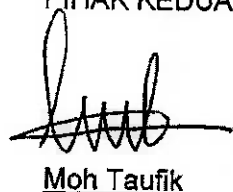
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Mhd. Idris Evrisal Lubis, S.IP, M.E.
NIP. 19940924 201609 1 007

PIHAK KEDUA



Moh Taufik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta
KPKNL Jakarta IV
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, 10410
Telp. (021) 3440910

Hasil Pelaksanaan

Informasi Lot Lelang

Kode Lot Lelang : 8COL0R
Nama Lot Lelang : 1 (Salu) paket barang inventaris kantor dalam kondisi rusak berat di Kota Adm. Jakarta Pusat
Status : LAKU

Detail Pemenang

Nama : Moh taufik
Keikutsertaan : Untuk Diri Sendiri
NIK : 3527051104930004
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Dsn pammasan. 001/002
No. Handphone : 62083853710879
NPWP : -
Virtual Account : 9880050925120295

Rincian Pelunasan

Nilai Penawaran : Rp 5.564.353,00
Bea Lelang Pembeli (2 %) : Rp 111.288,00
Bea Materai : Rp 10.000,00
Total : Rp 5.685.641,00
Uang Jaminan : Rp 764.353,00
Total Pelunasan : Rp 4.921.288,00
Batas Akhir Pelunasan : 2026-02-03

Rekapitulasi Penawaran

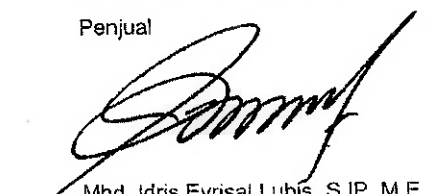
*Sesuai ketentuan dalam Hal terdapat lebih dari 1 (satu) penawar tertinggi yang sama, Peserta lelang yang penawarannya diterima lebih dahulu disahkan sebagai Pemenang

No	Nama Peserta	Nilai	Waktu
1	Moh taufik	Rp 5.564.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:59:55 WIB
2	RUDI	Rp 3.164.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:59:28 WIB
3	Munawar	Rp 3.114.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:59:13 WIB
4	Mzahri	Rp 3.064.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:58:58 WIB
5	Munawar	Rp 2.064.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:58:52 WIB

6	Jumar	Rp 2.014.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:50:40 WIB
7	Heriyah	Rp 1.964.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:49:42 WIB
8	Jumar	Rp 1.914.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:41:15 WIB
9	Jumar	Rp 1.864.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:35:37 WIB
10	Mat amin	Rp 1.814.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:30:56 WIB
11	M NO'E	Rp 1.764.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:21:23 WIB
12	RUDI	Rp 1.264.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:15:05 WIB
13	Munawar	Rp 1.214.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:09:26 WIB
14	Jumar	Rp 1.164.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:07:36 WIB
15	Rohid arifin	Rp 1.114.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:04:36 WIB
16	Rohid arifin	Rp 1.064.353,00	27 Jan 2026 Jam 09:03:50 WIB
17	Jumar	Rp 1.014.353,00	27 Jan 2026 Jam 08:33:10 WIB
18	Mawawi	Rp 964.353,00	27 Jan 2026 Jam 07:45:34 WIB
19	Moh taufik	Rp 914.353,00	27 Jan 2026 Jam 07:22:21 WIB
20	Jumar	Rp 864.353,00	26 Jan 2026 Jam 23:57:36 WIB
21	Heriyah	Rp 814.353,00	26 Jan 2026 Jam 22:52:46 WIB
22	Hasan	Rp 764.353,00	26 Jan 2026 Jam 22:20:14 WIB

Mengetahui dan menyetujui,

Penjual


Mhd. Idris Evrisal Lubis, S.IP, M.E.
199409242016091007

Pejabat Lelang


NIKO PRASTIYA
198810182010121001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2026

Kementerian/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-
010.01.1.483005/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

KPPN : (133) Jakarta IV

Satuan Kerja : (483005) DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 253.781.032,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00035/KWTI/483005/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	0,00	981.609.107,00	727.828.075,00	253.781.032,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	981.609.107,00	727.828.075,00	253.781.032,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	0,00	750.500.100,00	496.719.068,00	253.781.032,00
	1. BP UP*)	0,00	300.000.000,00	157.602.239,00	142.397.761,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	450.500.100,00	339.116.829,00	111.383.271,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 157.602.239,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	24.635.569,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	229.145.463,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	253.781.032,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	253.781.032,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	253.781.032,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	142.397.761,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	157.602.239,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	111.383.271,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	111.383.271,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SYARMADANI

Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

DKI JAKARTA, Januari 2026

Bendahara Pengeluaran

NURKHOTIMAH

Penata Muda TK I (III/b) 198504072015032002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Februari 2026

Kementerian/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-010.01.1.483005/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

KPPN : (133) Jakarta IV

Satuan Kerja : (483005) DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 384.599.756,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00002/SSPB/483005/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	253.781.032,00	2.267.791.573,00	2.136.972.849,00	384.599.756,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	253.781.032,00	2.267.791.573,00	2.136.972.849,00	384.599.756,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	253.781.032,00	1.420.411.375,00	1.269.592.651,00	384.599.756,00
	1. BP UP*)	142.397.761,00	599.142.813,00	697.725.593,00	43.814.981,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	111.383.271,00	771.630.000,00	542.228.496,00	340.784.775,00
	4. BP Parak	0,00	49.638.562,00	49.638.562,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 256.185.019,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	27.915.918,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	356.683.838,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	384.599.756,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	384.599.756,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	384.599.756,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	43.814.981,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	256.185.019,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	340.784.775,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	340.784.775,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


SYARIFADANI

Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

DKI JAKARTA, Februari 2026

Bendahara Pengeluaran



NURKHOTIMAH

Penata Muda TK I (III/b) 198504072015032002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Maret 2026

Kementerian/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-010.01.1.483005/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

KPPN : (133) Jakarta IV

Satuan Kerja : (483005) DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 275.253.123,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00085/SSP/483005/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	384.599.756,00	2.314.147.364,00	2.423.493.997,00	275.253.123,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	384.599.756,00	2.314.147.364,00	2.423.493.997,00	275.253.123,00
2.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	384.599.756,00	1.369.680.403,00	1.479.027.036,00	275.253.123,00
1.	BP UP*)	43.814.981,00	898.503.670,00	817.173.061,00	125.145.590,00
2.	BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	340.784.775,00	420.583.620,00	611.260.862,00	150.107.533,00
4.	BP Pajak	0,00	50.593.113,00	50.593.113,00	0,00
5.	BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 174.854.410,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	1.335.310,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	273.917.813,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	275.253.123,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	275.253.123,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	275.253.123,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	125.145.590,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	174.854.410,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	150.107.533,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	150.107.533,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SYARMADANI

Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

DKI JAKARTA, Maret 2026

Bendahara Pengeluaran

NURKHOTIMAH

Penata Muda TK I (III/b) 198504072015032002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: April 2026

Kementerian/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025, DIPA-010.01.1.483005/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

KPPN : (133) Jakarta IV

Satuan Kerja : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 320.973.408,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00376/KW/483005/2026

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, BPP dan UM	275.253.123,00	3.632.961.180,00	3.587.240.895,00	320.973.408,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	275.253.123,00	3.632.961.180,00	3.587.240.895,00	320.973.408,00
2.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	275.253.123,00	2.362.299.746,00	2.316.579.461,00	320.973.408,00
1.	BP UP*)	125.145.590,00	896.930.489,00	1.014.846.636,00	9.229.443,00
2.	BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	150.107.533,00	1.413.913.470,00	1.252.277.038,00	311.743.965,00
4.	BP Pajak	0,00	49.455.787,00	49.455.787,00	0,00
5.	BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 290.770.557,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	35.395.327,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	285.578.081,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	320.973.408,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	320.973.408,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	320.973.408,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	9.229.443,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	290.770.557,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	311.743.965,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	311.743.965,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SYARMADANI

Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

DKI JAKARTA, April 2026

Bendahara Pengeluaran

NURKHOTIMAH

Penata Muda TK I (III/b) 198504072015032002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2026

Kementerian/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-
010.01.1.483005/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

KPPN : (133) Jakarta IV

Satuan Kerja : (483005) DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 874.884.379,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00155/SSP/483005/2026

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, BPP dan UM	320.973.408,00	3.217.102.174,00	2.663.191.203,00	874.884.379,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	320.973.408,00	3.217.102.174,00	2.663.191.203,00	874.884.379,00
2.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	320.973.408,00	2.179.017.674,00	1.625.106.703,00	874.884.379,00
1.	BP UP*)	9.229.443,00	899.590.079,00	709.489.480,00	199.330.042,00
2.	BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	311.743.965,00	1.246.732.550,00	882.922.178,00	675.554.337,00
4.	BP Pajak	0,00	32.695.045,00	32.695.045,00	0,00
5.	BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 100.669.958,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	33.265.149,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	841.619.230,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	874.884.379,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	874.884.379,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	874.884.379,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	199.330.042,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	100.669.958,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	675.554.337,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	675.554.337,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SYARMADANI

Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

DKI JAKARTA, Mei 2026

Bendahara Pengeluaran

NURKHOTIMAH

Penata Muda TK I (III/b) 198504072015032002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-
010.01.1.483005/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

KPPN : (133) Jakarta IV

Satuan Kerja : (483005) DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 176.283.714,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00321/KWTI/483005/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	874.884.379,00	3.258.680.762,00	3.957.281.427,00	176.283.714,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	874.884.379,00	3.258.680.762,00	3.957.281.427,00	176.283.714,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	874.884.379,00	1.720.663.690,00	2.419.264.355,00	176.283.714,00
	1. BP UP*)	199.330.042,00	1.198.270.360,00	1.312.114.863,00	85.485.539,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	675.554.337,00	423.882.500,00	1.008.638.662,00	90.798.175,00
	4. BP Pajak	0,00	98.510.830,00	98.510.830,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 214.514.461,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	7.183.108,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	169.100.606,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	176.283.714,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	176.283.714,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	176.283.714,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	85.485.539,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	214.514.461,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	90.798.175,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	90.798.175,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


SYARMADANI
Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

DKI JAKARTA, Juni 2026

Bendahara Pengeluaran



NURKHOTIMAH

Penata Muda TK I (III/b) 198504072015032002



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[@dkpp_ri](#)

[medsosdkpp](#)

[@DKPP_RI](#)

[DKPP RI](#)

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL ANTARA UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DENGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA BARANG (UAKPB)
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
UNTUK PERIODE PELAPORAN SEMESTER I TA 2026
NOMOR: 12 / BAR-DKPP / VII / 2026**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hening Woro Hastami
NIP : 19900106 201010 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

- II. Nama : Mhd. Idris Evrisal Lubis
NIP : 19940924 201609 1 007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

menyatakan bahwa telah dilakukan rekonsiliasi internal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan cara membandingkan data Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Barang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disusun oleh UAKPA dan UAKPB untuk periode pelaporan Semester I TA 2026, dengan hasil sebagai berikut:

No	Kode Akun	Nama Akun	LK	LBMN	SELISIH
A	ASET LANCAR				
1	117111	Barang Konsumsi	Rp 386.871.432	Rp 386.871.432	Rp -
2	117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp 13.862.285	Rp 13.862.285	Rp -
3	117131	Bahan Baku	Rp 398.000	Rp 398.000	Rp -
4	117199	Persediaan Lainnya	Rp 2.334.321	Rp 2.334.321	Rp -
		Jumlah Aset Lancar	Rp 403.466.038	Rp 403.466.038	Rp -

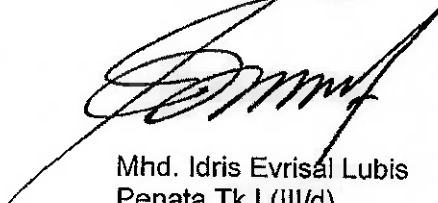
ASET TETAP							
B							
1	132111	Peralatan dan Mesin	Rp	28.699.268.695	Rp	28.699.268.695	Rp
2	135121	Aset Tetap Lainnya	Rp	5.597.607.638	Rp	5.597.607.638	Rp
		Akumulasi					
3	137411	Penyusutan Aset Tetap	-Rp	17.833.409.558	-Rp	17.833.409.558	Rp
		Jumlah Aset Tetap	Rp	16.463.466.775	Rp	16.463.466.775	Rp
C	ASET LAINNYA						
1	162151	Software	Rp	3.174.472.555	Rp	3.174.472.555	Rp
2	166112	Aset Lain-lain	Rp	16.500.000	Rp	16.500.000	Rp
		Akumulasi					
	169315	Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-Rp	2.940.972.555	-Rp	2.940.972.555	Rp
		Jumlah Aset Lainnya	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000	Rp
		TOTAL	Rp	17.116.932.813	Rp	17.116.932.813	Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri untuk periode pelaporan Semester I TA 2026, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan


Hening Woro Hastami
Penata Tk I (III/d)
NIP 19900106 201010 2 001

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga


Mhd. Idris Evrisal Lubis
Penata Tk I (III/d)
NIP 19940924 201609 1 007

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Dalam Negeri
Eselon I	: Sekretariat Jenderal
Wilayah	: DKI Jakarta
Satuan Kerja	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005)
No. Dokumen	: 1) 001
	2) 002
	3) 003
	4) 004
	5) 005
	6) 006
Tanggal Dokumen	: 1) 30/06/2025
	2) 30/06/2025
	3) 30/06/2025
	4) 30/06/2025
	5) 30/06/2025
	6) 30/06/2025
Tahun Anggaran	: 2026
Keterangan	: -

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Dimuka		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Persediaan
	Belanja Bayar Dimuka		Transfer Keluar
V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Reklasifikasi Neraca
	Penyisihan Piutang		Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	512411	Belanja Tunjangan Kinerja		78.866.045
	K	212111	Beban Belanja Pegawai	78.866.045	

Keterangan:

Jurnal Balik Akhir Tahun atas beban Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2025 yang dibayarkan di tahun 2026

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
2	D	511628	Belanja Uang Makan PPPK		11.900.000
	K	212111	Beban Belanja Pegawai	11.900.000	

Keterangan:

Jurnal Balik Akhir Tahun atas beban Belanja Pegawai berupa Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025 yang dibayarkan di Tahun 2026

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
3	D	511129	Belanja Uang Makan PNS		23.853.000
	K	212111	Beban Belanja Pegawai	23.853.000	

Keterangan:

Jurnal Balik Akhir Tahun atas beban Belanja Pegawai berupa Uang Makan PNS Bulan Desember 2025 yang dibayarkan di Tahun 2026

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
4	D	522191	Belanja Jasa Lainnya		3.894.990
	K	212112	Beban Belanja Barang	3.894.990	

Keterangan:

Jurnal Balik Akhir Tahun atas Beban Langganan Jasa Lainnya tagihan Desember 2025 yang dibayarkan pada Tahun 2026

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
5	D	522191	Belanja Jasa Lainnya		52.545.716
	K	212112	Beban Belanja Barang	52.545.716	

Keterangan:

Jurnal Balik Akhir Tahun atas Beban Langganan Listrik tagihan Desember 2025 yang dibayarkan pada Tahun 2026

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
6	D	218111	Utang yang belum ditagihkan		434.740.676
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	434.740.676	

Keterangan:

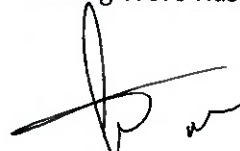
Jurnal Balik atas pembayaran Belanja Barang melalui mekanisme RPATA berupa Jasa Internet Lain (ISP) dan Alih Daya Outsourcing

Dibuat dan Direkam Oleh:
Novita Iriana Tambunan, S.IP



Tanggal: 30 Juni 2026

Disetujui Oleh:
Hening Woro Hastami, S.STP., M.Si



Tanggal: 30 Juni 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 483005 - DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-01

Tgl Cetak : 29/07/26 12:27

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	83,562,212,000	83,562,212,000	0
2	Belanja	4,317,262,125	4,317,262,125	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	61,141,386	61,141,386	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Februari 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 483005 - DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-02

Tgl Cetak : 29/07/26 12:27

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	83,562,212,000	83,562,212,000	0
2	Belanja	7,561,002,487	7,561,002,487	0
3	Pengembalian Belanja	-7,915,575	-7,915,575	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	98,456,496	98,456,496	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Maret 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 483005 - DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-03

Tgl Cetak : 29/07/26 12:27
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	83,562,212,000	83,562,212,000	0
2	Belanja	12,920,812,043	12,920,812,043	0
3	Pengembalian Belanja	-11,042,715	-11,042,715	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	391,852,496	391,852,496	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 April 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 483005 - DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-04

Tgl Cetak : 29/07/26 12:27
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	79,779,959,000	79,779,959,000	0
2	Belanja	17,841,917,508	17,841,917,508	0
3	Pengembalian Belanja	-18,095,043	-18,095,043	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	401,227,844	401,227,844	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Mei 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 483005 - DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-05

Tgl Cetak : 29/07/26 12:27

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	79,779,959,000	79,779,959,000	0
2	Belanja	23,306,109,978	23,306,109,978	0
3	Pengembalian Belanja	-18,783,889	-18,783,889	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	477,227,844	477,227,844	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Juni 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 483005 - DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 29/07/26 12:28
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	79,779,959,000	79,779,959,000	0
2	Belanja	29,526,170,873	29,526,170,873	0
3	Pengembalian Belanja	-19,527,581	-19,527,581	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	521,801,344	521,801,344	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Juli 2026



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	90,798,175	0	90,798,175	0.00
Persediaan	403,466,038	441,491,876	(38,025,838)	(8.61)
JUMLAH ASET LANCAR	794,264,213	441,491,876	352,772,337	79.90
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	28,699,268,695	28,010,131,819	689,136,876	2.46
Aset Tetap Lainnya	5,597,607,638	5,597,607,638	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,833,409,558)	(17,220,923,671)	(612,485,887)	3.56
JUMLAH ASET TETAP	16,463,466,775	16,386,815,786	76,650,989	0.47
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,174,472,555	3,174,472,555	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	438,709,749	(438,709,749)	(100.00)
Aset Lain-lain	16,500,000	234,819,113	(218,319,113)	(92.97)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,940,972,555)	(3,034,291,668)	93,319,113	(3.08)
JUMLAH ASET LAINNYA	250,000,000	813,709,749	(563,709,749)	(69.28)
JUMLAH ASET	17,507,730,988	17,642,017,411	(134,286,423)	(0.76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,195,834,783	605,800,427	590,034,356	97.40
Utang Yang Belum Ditagihkan	1,362,075,462	0	1,362,075,462	0.00
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,857,910,245	605,800,427	2,252,109,818	371.76
JUMLAH KEWAJIBAN	2,857,910,245	605,800,427	2,252,109,818	371.76
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,649,820,743	17,036,216,984	(2,386,396,241)	(14.01)
JUMLAH EKUITAS	14,649,820,743	17,036,216,984	(2,386,396,241)	(14.01)
JUMLAH EKUITAS	14,649,820,743	17,036,216,984	(2,386,396,241)	(14.01)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17,507,730,988	17,642,017,411	(134,286,423)	(0.76)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:46 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SYARMADANI

Pembina Utama Madya (IV/d) 197211011992011001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:36 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:46 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	17,036,216,984	17,358,419,035	(322,202,051)	(1.86)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(31,371,238,189)	(30,715,019,023)	(656,219,166)	2.14
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	28,984,841,948	29,175,480,855	(190,638,907)	(0.65)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,386,396,241)	(1,539,538,168)	(846,858,073)	55.01
EKUITAS AKHIR	14,649,820,743	15,818,880,867	(1,169,060,124)	(7.39)

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SYARMADANI

Pembina Utama Madya (IV/d)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM
 Tgl Cetak : 30/07/26 11:45 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	220	0	220	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	220	0	220	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	220	0	220	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,506,075,538	5,346,108,441	3,159,967,097	59.108
Beban Persediaan	495,376,617	88,224,870	407,151,747	461.493
Beban Barang dan Jasa	13,962,951,802	13,048,935,733	914,016,069	7.005
Beban Pemeliharaan	780,754,059	601,624,590	179,129,469	29.774
Beban Perjalanan Dinas	6,113,794,263	9,673,286,357	(3,559,492,094)	(36.797)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM
 Tgl Cetak : 30/07/26 11:45 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,025,528,181	1,979,746,532	45,781,649	2.313
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	31,884,480,460	30,737,926,523	1,146,553,937	3.73
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(31,884,480,240)	(30,737,926,523)	(1,146,553,717)	3.73
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	974,353	0	974,353	
Pendapatan Pelepasan Aset	5,564,353	0	5,564,353	
Beban Pelepasan Aset	4,590,000	0	4,590,000	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	512,267,698	22,907,500	489,360,198	2,136.244
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	512,267,698	22,907,500	489,360,198	2,136.244
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	513,242,051	22,907,500	490,334,551	2,140.498
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(31,371,238,189)	(30,715,019,023)	(656,219,166)	2.136
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(31,371,238,189)	(30,715,019,023)	(656,219,166)	2.136

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SYARMADANI
Pembina Utama Madya (IV/d)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI 010
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU 483005

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 11:45 AM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	521,801,344	521,801,344	0	0	22,907,500	(22,907,500)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	521,801,344	521,801,344	0	0	22,907,500	(22,907,500)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	521,801,344	521,801,344	0	0	22,907,500	(22,907,500)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	79,779,959,000	29,506,643,292	(50,273,315,708)	37	89,271,812,000	28,899,211,242	60,372,600,758	32
1. Belanja Pegawai	19,495,124,000	8,049,529,975	(11,445,594,025)	41	9,340,497,000	5,260,214,794	4,080,282,206	56
2. Belanja Barang	58,103,311,000	19,475,344,147	(38,627,966,853)	34	73,814,043,000	22,980,049,758	50,833,993,242	31
3. Belanja Modal	2,181,524,000	1,981,769,170	(199,754,830)	91	6,117,272,000	658,946,690	5,458,325,310	11
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI 010
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU 483005



Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM
Tgl Cetak : 30/07/26 11:45 AM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	79,779,959,000	29,506,643,292	(50,273,315,708)	37	89,271,812,000	28,899,211,242	60,372,600,758	32
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SYARMADANI
Pembina Utama Madya (IV/d)

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:36 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:45 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	29,506,643,292
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	521,801,344	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,564,353
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	220
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	348
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	516,236,423
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,847,930,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,048	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	87,811,320	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,315,438	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	128,240,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	107,404,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,086,980	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	71,840,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	196,829,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	39,035,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,212,273,404	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	771,990,408	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,559	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	49,672,744	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,315,137	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	46,288,450	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	100,509,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	46,486,218	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,486,143,097	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	803,429,732	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	899,576,767	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,433,570	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42,350,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	474,561,793	0
3.0	521211	Belanja Bahan	684,406,948	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,670,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,380,979,851	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	342,469,801	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	337,424,441	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	74,404,348	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	26,973,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:36 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:45 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	2,654,940,994	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	308,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,504,521,434	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334,372,932	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124,774,953	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323,378,152	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75,690,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,073,853,844	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	166,110,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	590,428,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29,540,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,981,769,170	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,110,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	18,417,581
JUMLAH			30,047,972,217	30,047,972,217

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 30 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SYARMADANI

197211011992011001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	90,798,175	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	386,871,432	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,862,285	0
0.0	117131	Bahan Baku	398,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	2,334,321	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	28,699,268,695	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	5,597,607,638	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,833,409,558
0.0	162151	Software	3,174,472,555	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	16,500,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	16,500,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,924,472,555
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	571,164,608
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	533,872,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	90,798,175
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,362,075,462
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	300,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	29,506,643,292
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	521,801,344	0
0.0	391111	Ekuitas	0	17,036,216,984
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,564,353
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	220
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	348
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	512,267,350
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,058,385,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	27,072	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,794,368	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	21,827,753	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	144,270,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	119,652,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	22,558,143	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	80,893,140	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	172,976,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	43,845,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,390,363,404	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	876,068,108	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Tgl Data : 30/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 30/07/26 11:44 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	16,533	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	56,625,764	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	15,126,561	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	52,588,990	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	88,609,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	52,741,218	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,407,277,052	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	803,429,732	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,050,221,418	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,008,570	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,820,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	478,518,503	0
3.0	521211	Beban Bahan	768,298,948	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	19,670,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,382,479,851	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	337,424,441	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	74,404,348	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	26,973,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,777,090,995	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	310,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	6,661,341,728	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334,372,932	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	360,796,252	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,326,186,263	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	167,640,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	590,428,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29,540,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,900,528,181	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	125,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	494,291,820	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,969,675	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	73,615,200	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	297,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	787,797	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	4,590,000	0
JUMLAH			70,692,984,905	70,692,984,905

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 30 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SYARMADANI
Pembina Utama Madya (IV/d)